



Pemerintah Bentuk Forum Komunikasi Antisipasi PHK

Omzet perusahaan otomotif anjlok.

Ali Nur Yasin
 ali@tempo.co.id

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota Yogyakarta turut waswas menyusul pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp 14.000. "Tentu yang paling menjadi kewaspadan jika terpuruknya rupiah lalu jadi alasan dan momen pengusaha melakukan perampingan perusahaan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Yogyakarta Hadi Mochtar kepada *Tempo*, kemarin.

Dia meminta kalangan pengusaha di wilayahnya tak menjadikan pelemahan rupiah sebagai alasan untuk melakukan PHK. Apalagi selama ini perekonomian kota masih ditopang sektor jasa. "Sektor usaha yang bahan baku produksinya tergantung fluktuasi dolar di kota juga tak ada 10 persen," ujarnya.

Untuk mengantisipasi sektor usaha yang benar-benar terkena dampak terpuruknya rupiah ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja akan membuka forum komunikasi bagi pengusaha yang mengalami

kendala.

"Kami meminta PHK tak jadi solusi tunggal mengatasi masalah, banyak cara lain yang lebih bijak," kata Hadi. Misalnya, mengurangi sementara kapasitas produksi atau mengurangi bonus-bonus karyawan tanpa memangkas gaji pokoknya.

Sejak rupiah terus melemah sepanjang awal Agustus ini, dari 1.300 perusahaan di Kota Yogyakarta, belum ada yang terpantau melakukan PHK pada karyawannya. Dari seluruh perusahaan itu, tercatat ada sekitar 67 ribu karyawan menggantungkan nasib.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Yogyakarta Taryoto mengakui pihaknya belum membahas ihwal masih melemahnya rupiah atas dolar tersebut dengan asosiasinya. "Masih akan kami rapatkan," ujarnya singkat.

Sektor yang berpotensi terimbas melemahnya rupiah itu di antaranya bidang transportasi. Dengan komponen-komponen seperti untuk kendaraan bus yang rata-rata masih impor "Onderdil memang sebagian masih impor sehingga harganya ikut terpengaruh,

apalagi jika BBM (bahan bakar minyak) ikut naik," ujar pengusaha Perusahaan Otobus Maju Lancar asal Gunungkidul, Didit Adi Prasetyo, kepada *Tempo*.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang mencapai 14 ribu, membuat biaya produksi produk otomotif membengkak. Pengusaha bersiap untuk menaikkan harga produk kendaraan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Buntoro, mengatakan menguatnya nilai tukar dolar memukul industri yang mengandalkan bahan baku impor. Industri otomotif adalah satu di antara yang terkena imbas melemahnya nilai tukar rupiah. Pengusaha otomotif mengimpor 40 persen bahan baku sehingga membuat biaya produksi meningkat.

Pengusaha otomotif, kata Buntoro, sulit menaikkan harga jual produk di tengah menurunnya daya beli masyarakat. "Mereka mau tak mau harus mengorbankan keuntungannya untuk bertahan dalam situasi sekarang," ujarnya, kemarin.

Buntoro berharap pemerintah segera mengatasi persoalan ini supaya tak berlarut-larut. Menguatnya

dolar terhadap rupiah seperti dua sisi mata uang. Untuk industri berskala ekspor, menggunakan bahan baku lokal kondisi saat ini menguntungkan.

Direktur Marketing New Armada PT Mekar Armada Jaya—perusahaan karoseri di Magelang, Jawa Tengah—Harris Imam S., mengatakan, melemahnya nilai tukar rupiah memukul industri otomotif. Daya beli masyarakat yang menurun berimbas pada permintaan produk di perusahaannya anjlok hingga 30 persen.

Perusahaan itu saat ini mampu memproduksi 400 unit minibus dan bus. Satu proyek pesanan bus bernilai Rp 400-500 juta dan minibus Rp 60-100 juta. Sedangkan omzet per hari rata-rata sebesar Rp 1,5 miliar. "Kami tombok. Omzet menurun 30 persen," kata Harris.

Dia menyebutkan, membengkaknya komponen biaya produksi terjadi akibat kurs dolar yang terus menguat. Satu unit mobil di perusahaan itu menggunakan 40 persen bahan baku impor. Dia mencontohkan lampu bagian depan dan belakang kendaraan ataupun engsel impor dari Korea Selatan, Cina, dan Taiwan.

• RIBADI WICAKSONO | SHINTA MAHARANI

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005